

RENCANA AKSI KEGIATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III PALU



2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekejarantinaan di pintu masuk Negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 29 Agustus 2020

Kepala Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu



Hasanuddin SKM

NIP 196212241983031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaaan

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana

Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu pada awal tahun 2020 jumlah anggaran yang tersedia sesuai DIPA sebesar Rp. 11.125.312.000,- kemudian pada bulan Maret 2020 terjadi revisi dengan munculnya kasus Covid-19, sehingga berubah menjadi Rp. 12.859.312.000,- dengan jumlah pegawai sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang ditempatkan di 5 (lima) wilayah kerja dan 1 (satu) kantor induk yang berada di Kota Palu. Adapun kelima wilayah kerja tersebut adalah : 1). Wilayah Kerja Wani, 2). Wilayah Kerja Bandar Udara Sis-Aljufri, 3). Wilayah Kerja Donggala, 4). Wilayah Kerja Luwuk, 5). Wilayah Kerja Tolitoli dan 6). Wilayah Kerja Buol. Selain terdiri dari 5 (lima) wilayah kerja dan 1 (satu) kantor induk, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu terdiri dari 2 (seksi) di tambah 1 (satu) sub. Bagian tata usaha, adapun kedua seksi tersebut adalah : 1). Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah dan 2). Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi.

Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas III Palu. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya *Internasional Health Regulation (IHR)* revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 356/MENKES/PER/IV/2008; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu terletak di Propinsi Sulawesi Tengah yang berkantor di Jalan Bahari Kompleks Pelabuhan Pantoloan – Palu. Adapun letak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu berdasarkan Peta Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Peta Wilayah Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu



Keterangan :

1. Kantor Induk Pantoloan
2. Wilker Wani
3. Wilker Bandara Mutiara Sis Aljufri
4. Wilker Donggala
5. Wilker Luwuk
6. Wilker Tolitoli
7. Wilker Buol

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu, dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2019.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian

masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dengan sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara terdapat indikator kinerja output yaitu :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan.
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP.
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit.
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus.
5. Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.
6. Jumlah sertifikat / surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan.
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi.
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung.
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P.
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 yang ditanda tangani antara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu telah berhasil mencapai target

dan indikator yang ditetapkan untuk tahun 2019. Adapun capaian Kinerja tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan dengan jumlah target sebanyak 8.000 sertifikat dengan capaian sebanyak 8.127 sertifikat atau 101,58 %.
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP dengan jumlah target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 95 %.
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan jumlah target sebanyak 60 sertifikat dengan capaian sebanyak 74 sertifikat atau 123,3 %.
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dengan jumlah target sebanyak 30 layanan dengan capaian sebanyak 3 layanan atau 10 %.
5. Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dengan jumlah target sebanyak 3 pelabuhan / bandara dengan capaian sebesar 1 pelabuhan / bandara atau 33,3 %.
6. Jumlah sertifikat / surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan jumlah target sebanyak 2.000 sertifikat dengan capaian sebanyak 1.904 sertifikat atau 95,2%.
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan jumlah target sebanyak 7 pelabuhan / bandara dengan capaian sebesar 7 pelabuhan / bandara atau 100 %.
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dengan jumlah target sebanyak 7 pelabuhan / bandara dengan capaian sebesar 7 pelabuhan / bandara atau 100 %.
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan jumlah target sebanyak 800 orang dengan capaian sebesar 800 orang atau 100 %.
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target sebanyak 40 dokumen yang terealisasi sebanyak 40 dokumen atau 100 %.

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dengan jumlah target sebanyak 14 orang dan terealisasi sebanyak 17 orang atau 121,4 %.
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana dengan jumlah target sebanyak 72 unit dan terealisasi sebanyak 56 unit atau 77,8 %

Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi disekelilingnya. Upaya pengembangan SDM di KKP Kelas III Palu dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini memacu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim yang cukup kondusif bagi kemajuan organisasi. Jumlah SDM KKP Kelas III Palu periode Januari s.d Agustus 2020 tercatat memiliki 55 orang pegawai dengan komposisi dan jenis ketenagaan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Master (Strata 2) Kesehatan | : 4 orang |
| 2. Strata 1 | : 21 orang |
| 3. Diploma III | : 22 orang |
| 4. Diploma IV | : 0 orang |
| 5. Diploma I | : 3 orang |
| 6. SMU | : 4 orang |

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Guna menjamin keberhasilan kegiatan tersebut KKP Kelas III Palu saat ini memiliki sarana gedung kantor induk yang berada di Kota Palu. Sedangkan wilayah kerja yang sudah memiliki gedung atau bangunan adalah : Wilayah Kerja Luwuk dan Tolitoli yang dibangun pada tahun 2016, Wilayah Kerja Donggala dibangun pada tahun 2017 dan Wilayah Kerja Buol pembangunannya telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Sedangkan Wilayah Kerja yang belum memiliki gedung sendiri adalah : Wilayah Kerja Bandara dan Wilayah Kerja Wani.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2348/ Menkes/ Per/XI/ 2011, Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsinya yaitu :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

Pelaksanaan program kegiatan tersebut terdistribusi pada beberapa bagian yaitu bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan (TU), Seksi Pengendalian Kekeparantinaan dan Surveillance Epidemiologi (PK & SE), seksi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) & KLW :

a. *Sub Bagian Tata Usaha*

- 1) Pengadaan ATK dan inventaris milik negara.
- 2) Pemeliharaan gedung, halaman dan taman.
- 3) Pengadaan formasi kebutuhan tenaga.
- 4) Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi.
- 5) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

b. *Seksi Pengendalian Karantina & SE*

- 1) Surveilens epidemiologi penyakit.
- 2) Pengawasan alat angkut.
- 3) Pengawasan lalu lintas OMKABA.
- 4) Pelatihan teknis bidang kekeparantinaan.
- 5) Pengawasan dan pelaksanaan kekeparantinaan.
- 6) Pengawasan dan persediaan obat P3K.

c. *Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan & KLW*

- 1) Penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan.
- 2) Pengawasan dan pengendalian vektor (Nyamuk Aedes Aegypti & Anopheles).
- 3) Pengawasan Sanitasi Lingkungan.
- 4) Pengawasan Kapal, Pesawat (Alat Angkut).
- 5) Pengawasan Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga.
- 6) Pengawasan TTU, Bangunan dan Gedung.
- 7) Pengendalian Tikus dan Pinjal.
- 8) Pengendalian Lalat dan Kecoak.
- 9) Pengawasan Kualitas Lingkungan (Air, Tanah dan Udara).
- 10) Pengawasan Kebisingan.
- 11) Pengawasan Makanan / Minuman.

- 12) Pelayanan Kesehatan Terbatas.
- 13) Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, Matra dan Haji.
- 14) Penanggulangan Tanggap Darurat (Penanggulangan Bencana).
- 15) Sistem Kewaspadaan dini dan KLB (Kejadian Luar Biasa).
- 16) Vaksinasi Internasional.
- 17) Pengembangan Teknologi dan pelatihan teknis.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensial

a. Letak Geografis KKP Kelas III Palu

Secara geografis dan Klimatologi, Propinsi Sulawesi Tengah terletak di garis khatulistiwa ($2^{\circ}\text{LU} - 3,48^{\circ}\text{LS}$) dengan temperatur antara $25^{\circ} - 34^{\circ}\text{C}$ dan luas daratan $68,033 \text{ Km}^2$. Diawal terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April 1964, hanya terdiri atas 4 (empat) daerah tingkat II, namun seiring dengan perkembangan politik kini Propinsi Sulawesi Tengah terbagi atas 12 daerah tingkat II.

KKP Kelas III Palu merupakan salah satu pintu gerbang masuk Negara, oleh karena itu lalu lintas orang dan barang serta alat angkut sangat padat sehingga potensial untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maskapai penerbangan, agen pelayaran maupun pengembangan dalam upaya pengendalian faktor risiko dan cegah tangkal penyakit di wilayah kerjanya.

b. Sumber Daya Manusia

Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi disekelilingnya. Upaya pengembangan SDM di KKP Kelas III Palu dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini memacu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim yang cukup kondusif bagi kemajuan organisasi. Jumlah SDM KKP

Kelas III Palu periode Januari s.d Agustus 2020 tercatat memiliki 54 orang pegawai dengan komposisi dan jenis ketenagaan sebagai berikut :

- a) Master (Strata 2) Kesehatan : 4 orang
- b) Strata 1 : 21 orang
- c) Diploma III : 22 orang
- d) Diploma IV : 0 orang
- e) Diploma I : 3 orang
- f) SMU : 4 orang

c. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Guna menjamin keberhasilan kegiatan tersebut KKP Kelas III Palu saat ini memiliki sarana gedung kantor induk yang berada di Kota Palu. Sedangkan wilayah kerja yang sudah memiliki gedung atau bangunan adalah : Wilayah Kerja Luwuk dan Tolitoli yang dibangun pada tahun 2016, Wilayah Kerja Donggala dibangun pada tahun 2017 dan Wilayah Kerja Buol pembangunannya telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Sedangkan Wilayah Kerja yang belum memiliki gedung sendiri adalah : Wilayah Kerja Bandara dan Wilayah Kerja Wani.

d. Anggaran

Sumber dana yang cukup dan memadai merupakan salah satu pilar dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Namun dukungan dana tersebut harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah disahkan dan sesuai dengan sistem keuangan yang berlaku. Tahun 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu mendapat dana dari APBN sebesar **Rp. 11.125.312.000,-**. Pada bulan Maret 2020 terjadi revisi menjadi **Rp. 12.859.312.000,-** digunakan untuk mendukung kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Bagian PRL dan UKLW, dan Bagian PKSE.

e. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)

KKP Kelas III Palu dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku baik tingkat nasional maupun internasional (lihat pada BAB I Subbab Dasar Hukum). Di samping itu KKP Kelas III Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu kepada pedoman-pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PP dan PL.

Adapun pedoman-pedoman tersebut antara lain adalah :

- a) Pedoman Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- b) Standar Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan.

f. Kemitraan dan Jejaring Kerja

Penanganan masalah kesehatan di wilayah pelabuhan / bandara harus melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan (*stakeholders*) yang berada di pelabuhan/ bandara dalam suatu jaringan kerja. Kesulitan koordinasi terjadi karena masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan yang cukup besar, terutama dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang dan perlu penanganan segera. Selain itu, sosialisasi program kesehatan pada instansi terkait masih dirasakan kurang. Di lain pihak, sebenarnya lintas sektor yang berada di lingkungan pelabuhan/ bandara sangat membutuhkan kiprah dari KKP Kelas III Palu. Oleh karenanya, sangat potensial untuk dilibatkan dalam membentuk jejaring kerja dalam mengatasi masalah kesehatan, khususnya di lingkungan pelabuhan/ bandara. Pembentukan jejaring kerja tidak terbatas hanya di lingkungan pelabuhan/ bandara saja, tetapi juga bisa mencakup antar KKP maupun dengan instansi lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi Pertemuan Jejaring dalam Rangka Surveilans Epidemiologi.

g. Komitmen Global

Implementasi *International Health Regulation* (IHR) 2005 merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit/masalah kesehatan yang sering disebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). IHR tahun 2005 mengamanatkan dalam melakukan deteksi masalah PHEIC harus dilaksanakan lebih optimal, namun tidak menghambat arus lalu lintas barang/tidak menghambat arus perekonomian atau perdagangan.

Terjadinya perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (*emerging diseases*) dan/atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (*re-emerging diseases*), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah lainnya.

2. Permasalahan

a. KLB / Bencana

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum dipraktekkan oleh masyarakat khususnya di lingkungan Pelabuhan / bandara. Misalnya, masih banyaknya anggota masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat/ lingkungan sanitasinya buruk. Kondisi ini berdampak pada peningkatan angka kejadian penyakit menular. Keadaan ini perlu diwaspadai mengingat banyaknya Tenaga Bongkar Muat (TKBM), penjamah makanan yang ada di pelabuhan rata-rata pendidikannya rendah. Disamping itu, para TKBM ini dalam bekerja kurang memperhatikan aspek kesehatan kerja, sehingga rawan menimbulkan

terjadinya penyakit akibat kerja dan terjadinya KLB yang disebabkan karena konsumsi makanan yang kurang hygiene dan saniter.

b. Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur

Sebagian SDM di KKP Kelas III Palu belum terampil untuk melaksanakan tugas tugas pokok maupun untuk mengatasi/menghadapi kejadian-kejadian PHEIC. Demikian juga pemahaman terhadap prosedur pelayanan/kegiatan yang belum seluruh petugas memahaminya.

c. Lemahnya Koordinasi

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antara instansi terkait di wilayah pelabuhan. Sebagai contoh adalah kurangnya koordinasi antara KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi OMKABA di pelabuhan. Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa pelayaran, penerbangan, dll.

d. Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (*New Emerging Diseases & Re-emerging Diseases*)

Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga perjalanan dan penularan penyakit antar negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti *New Emerging Disease*, seperti *Avian Influenza*, *SARS*, *Legionnaires Disease*, Nipah Virus, dan *Paragoniasis Pulmonallis*. *Emerging Disease* antara lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, seperti *Dengue Haemorrhagic Fever*, Chikungunya, *Cholera*, *Salmonellosis*, dan *Filariasis*. *Emerging Disease* yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain HIV/AIDS sedangkan *Re-emerging disease* antara lain : Pes, TBC, *Scrub thypus*, Malaria, Anthrax, dan Rabies.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu memiliki tujuan strategis Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

C. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan Strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

Sejak berlakunya Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), maka KKP Kelas III Palu mengalami peningkatan jumlah wilayah kerja.

Akibat pengembangan organisasi ini membuka peluang bagi eksistensi KKP Kelas III Palu dimasa yang akan datang. Bidang kegiatan yang selama ini tidak terjangkau dan belum tertangani oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu karena terkendala struktur organisasi, diharapkan dapat dilaksanakan. Sebab tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu memungkinkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian hal ini juga mempunyai resiko apabila tidak ditangani dengan baik, terencana dan terarah.

Terkait dengan hal diatas maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian tentang arah kebijakan organisasi yang akan dilaksanakan, mengingat beban kerja dan tanggung jawab KKP Kelas III Palu menjadi lebih besar dan permasalahan yang timbul juga semakin berkembang dan kompleks.

Sejalan dengan berlakunya IHR 2005 yang mulai berlaku sejak tahun 2007 maka perlu pemahaman yang memadai bagi semua stakeholder terkait di lingkungan wilayah kerja KKP Kelas III Palu. Pemberlakuan IHR 2005 ini punya konsekuensi yang sangat kompleks mengingat adanya perbedaan prinsip yang mendasar dengan IHR 1969 sebelumnya. Semula dengan IHR 1969 hanya

diarahkan pada penyakit karantina yang tertuang dalam UU Karantina yaitu kolera, pes dan *yellow fever*. Sedangkan IHR 2005 sasarannya jauh lebih besar yaitu penyakit yang bias menyebabkan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit menular yang sudah ada, baru dan yang muncul kembali serta penyakit tidak menular, contohnya bahan radio-nuklir dan bahan kimia. IHR 2005 mengamanatkan bahwa KKP harus memiliki *core capacity* (kemampuan inti) yang mampu melakukan koordinasi, mengatasi cegah tangkal penyakit serta mampu mengatasi PHEIC dengan tidak menghambat perjalanan seseorang.

Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan RI senantiasa mendukung kebijakan tersebut dengan menyiapkan peralatan kemampuan deteksi seperti peralatan *thermal scanner*, rontgen, vektor control, mikroskop, *food poisoning detection kit*, radio komunikasi, dll. KKP Kelas III Palu diharapkan dapat mengoptimalkan semua kapasitas deteksi tersebut dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, membuat standar operasional kerja dan meningkatkan jejaring.

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut :

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sector dan program

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan, maka perlu dirumuskan strategis bagi KKP Kelas III Palu, dengan mengacu kepada kebijakan yang telah dirumuskan tersebut di atas. Strategi ini juga berguna untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dalam memberikan pelayanan.

1. Meningkatkan upaya kekarantinaan

Tindakan kekarantinaan adalah hal yang sangat penting dalam rangka cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit potensial wabah di pintu masuk Negara.

2. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain :

- a. Pengawasan alat angkut, barang dan orang
- b. Pemeriksaan P3K
- c. Pengawasan dan pemeriksaan OMKA
- d. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan kapal sesuai prosedur serta penegakan undang-undang yang terkait dengan kekarantinaan.

3. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi

Faktor yang berpengaruh pada peningkatan risiko penyakit secara global adalah meningkatnya arus perjalanan orang antar negara, baik melalui laut, udara dan lintas batas darat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, transportasi perkembangan perkotaan dan perubahan lingkungan yang mendadak dan besar. Penyakit baru sebagai ancaman global yaitu penyakit yang ada di Negara lain dan berpotensi masuk ke Indonesia, selain itu penyakit yang dianggap bukan masalah lagi, saat ini muncul kembali (re-emerging diseases) sehingga baik penyakit baru maupun penyakit yang muncul kembali dapat menjadi ancaman terjadinya kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International concern). Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya mengefektifkan Surveilans Epidemiologi. Penerapan Surveilans Epidemiologi yang efektif dapat menghasilkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat terhadap penyelesaian masalah kesehatan.

4. Meningkatkan Pengendalian Risiko Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai ruang lingkup tugas dalam pengendalian vektor dan binatang penular penyakit serta pembinaan sanitasi lingkungan termasuk alat angkut melalui berbagai upaya kegiatan yang dilakukan tahun 2015-2019 antara lain :

a. Pengamatan dan Pemberantasan Tikus/Pinjal

Kegiatan Pengamatan dan Pemberantasan Tikus/Pinjal bertujuan agar masyarakat di lingkungan pelabuhan terbebas dari penyakit menular yang disebarkan oleh pinjal dan kerugian-kerugian yang diakibatkan tikus.

Pada prinsipnya lingkungan pelabuhan dan alat angkut harus bebas dari infestasi tikus, oleh sebab itu daerah perimeter dan buffer pelabuhan jika tidak dilakukan pengendalian tikus merupakan factor risiko

Kegiatan pengamatan terhadap tikus di alat angkut dilakukan secara rutin selain itu dilakukan juga apabila ada alat angkut yang akan memperbaharui dokumen sanitasi alat angkut.

Upaya-upaya yang akan dilakukan kedepan :

- 1) Pemasangan perangkap
- 2) Penyisiran tikus
- 3) Identifikasi Pinjal
- 4) Fumigasi

b. Pengamatan dan Pengendalian Vektor

Upaya Pengendalian Vektor di Pelabuhan ditujukan pada pengamatan dan pengendalian populasi nyamuk terutama nyamuk *Aedes Aegypti* baik di daerah Perimeter maupun di daerah Buffer

Kegiatan yang akan dilakukan yakni :

- 1) Survey Jentik (stadium larva)
- 2) Survey Nyamuk
- 3) Fogging (pengasapan)
- 4) Abatesasi

Indikator yang dihasilkan dalam survey jentik *Aedes Aegypti* adalah House Index (HI) dan Container Index (CI).

c. Pengawasan Kualitas Air

Kualitas air adalah hal yang sangat penting, karena air merupakan media untuk penularan penyakit tertentu (Water Borne Diseases) pemeriksaan kualitas air bersih bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran.

Kegiatan pemeliharaan dilakukan terhadap :

- 1) Pengambilan Sampel
- 2) Pemeriksaan Fisik
- 3) Pemeriksaan Bakteriologis
- 4) Penerbitan sertifikat

d. Pengawasan Kualitas Makanan dan Minuman

Kegiatan pengawasan kualitas makan dan minuman di pelabuhan merupakan salah satunya dalam mencegah resiko terjadinya penyakit dan penularan penyakit bagi orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia
- 2) Pemeriksaan bakteriologis
- 3) Usap dubur dan alat makan.

e. Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan

Kegiatan pemeriksaan sanitasi pengolahan makanan (TPM) bertujuan untuk melihat secara langsung (On The Spot), mengawasi dan memberikan saran-saran terhadap kondisi suatu TPM yang berada di lingkungan pelabuhan dan bandara supaya dapat memenuhi persyaratan kesehatan.

f. Peningkatan Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut

Tujuan pemeriksaan sanitasi alat angkut (kapal dan pesawat) adalah untuk mengurangi risiko penularan penyakit akibat kondisi sanitasi kapal dan pesawat yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Pemeriksaan dilakukan secara :

- 1) Rutin yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada setiap kapal dan pesawat datang

- 2) Berkala yaitu pemeriksaan yang dilakukan 6 bulan sekali bersamaan dengan pemeriksaan tanda-tanda kehidupan guna penerbitan SSCEC/SSCC.

g. Peningkatan Pengendalian Lalat

Tujuannya untuk mencegah terjadi penularan penyakit melalui lalat di pelabuhan / bandara.

Upaya yang dilaksanakan :

- 1) Survei kepadatan di lingkungan pelabuhan / bandara dan asrama Haji (menjelang musim Haji)
- 2) Peyemprotan pada fokus asrama Haji

h. Peningkatan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

Fokus kegiatan pada upaya peningkatan kesehatan lintas wilayah mempunyai ruang lingkup :

- 1) Pelayanan kesehatan terbatas
 - a) Pelayanan poliklinik
 - b) Pemberian surat keterangan berbadan sehat.
 - c) Pemberian izin angkut orang sakit.
 - d) Pemberian izin angkut jenazah/abu/kerangka.
- 2) Pelayanan vaksinasi
 - a) Pemberian vaksinasi untuk perjalanan Internasional surat Jamaah Umroh.
 - b) Penerbitanbuku ICV, yaitu diberikan bagi pelaku perjalanan International dan Jamaah Umroh yang telah dilakukan vaksinasi.

i. Pelayanan Kesehatan Matra,

kegiatannya :

- 1) Pelayanan Jemaah Haji di asrama Haji dan di embarkasi/debarkasi Balikpapan
- 2) Pelayanan situasi khusus pada hari-hari Raya Nasional (Lebaran, Natal)
- 3) Respon cepat KLB Bencana alam jika ada kejadian Bencana Alam

j. Melengkapii Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung Kelancaran tugas KKP Kelas III Palu akan menambah sarana untuk kegiatan operasional berupa alat kesehatan, komputer, kendaraan roda 2 (dua) dengan roda 4 (empat). Selain itu secara bertahap akan diusulkan pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor wilker Toli-toli dan Buol serta renovasi kantor wilker Luwuk.

k. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Di era globalisasi akan muncul berbagai tantangan khususnya kesehatan, maka untuk menghadapi hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan loyalitas yang tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas akan dilakukan Analisis Kesehatan pegawai secara komperhensif, memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan, mengikuti pendidikan latihan (Diklat) Teknis dengan Administrasi, mengikutsertakan diklat penjenjangan karir dan mengefektifkan pembinaan ke wilayah kerja.

l. Meningkatkan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring Kerja

Untuk menyamakan persepsi akan di lakukan secara berkesinambungan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor. Koordinasi Lintas Sektor diadakan pada saat pertemuan *coffe morning* sedangkan dengan Lintas Program diadakan jika ada kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi Lintas Program. Selain itu ada di lakukan Kemitraan dan kerja sama dengan instansi lain diantaranya Puskesmas, Rumah Sakit, Kanwil Kementrian Agama Sulteng dan lain –lain.

m. Promosi Kesehatan

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang promosi akan dilakukan secara rutin promosi kesehatan melalui pembuatan brosur dan leaflet, penyuluhan tentang kesehatan.

n. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SOP

Untuk mencapai tujuan sesuai tupoksi, semua pegawai KKP Kelas III Palu dalam bekerja didorong untuk melakukan tugas dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

- o. Melengkapi sarana dan prasarana

Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan, langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas III Palu antara lain melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang.

C. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan, Pos Lintas Batas

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi dalam deteksi dini di pelabuhan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel. IV.1.
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis
RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu
Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan sebesar 50.000 2. Persentase faktor resiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90%

			<p>3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 85%</p> <p>4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80</p> <p>5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80%</p> <p>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 70</p> <p>7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45%</p>
--	--	--	---

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu adalah Meningkatkan faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan. Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Pengawasan dan Penerbitan Dokumen PHQC
 - b. Pengawasan dan Penerbitan Dokumen SSCEC / SSCC
 - c. Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat P3K
 - d. Pengawasan dan Penerbitan Dokumen Fre Pratique
 - e. Pengawasan dan Penerbitan Surat Izin Laik terbang (Pemkes, Bumil, Bayi dan Orang Sakit)
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada : orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- Kegiatan yang dilakukan :
- a. Surveilans Epidemiologi Embarkasi Haji Balikpapan
 - b. Surveilans Epidemiologi di Asrama haji Transito Palu
 - c. Surveilans Epidemiologi Debarkasi Haji Balikpapan
 - d. Pengamatan Penyakit Berpotensi Wabah / Jejaring Kerja Lintas Sektor
 - e. Penyelidikan Epidemiologi Investigasi KLB / Penanggulangan KLB
 - f. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari Dalam Negeri
 - g. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari Luar Negeri
 - h. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat dari dalam Negeri
 - i. Pengawasan Orang Sakit
 - j. Pengawasan Angkut Jenazah
 - k. Pengawasan Kedatangan Penumpang Kapal dari dalam Negeri
 - l. Pengawasan Keberangkatan Penumpang Kapal dari Dalam Negeri
 - m. Pengawasan Kedatangan Penumpang Pesawat dari Dalam Negeri
 - n. Pengawasan Keberangkatan Penumpang Pesawat dari Dalam Negeri
 - o. Pengawasan ABK dan Crew Alat angkut..
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara
- Kegiatan yang dilakukan :
1. .
 2. ..
4. Nilai kinerja anggaran
- Kegiatan yang dilakukan :
1. ...
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. ..

2. ..

6. Kinerja implementasi WBK Satker

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengendalian gratifikasi

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

3. Menerapkan pelayanan prima terhadap masyarakat

4. Melakukan internalisasi tentang *Whistle Blowing System* terhadap seluruh pegawai

5. Melakukan identifikasi terhadap benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Mengikutsertakan ASN untuk mengikuti pelatihan atau Diklat sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya.

2. Mengikutsertakan ASN dalam setiap kegiatan Workshop sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya.

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel IV.2.
Pendanaan Bersumber APBN
Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					ALokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000					
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	92%	93%	94%	95%					
3.	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara	85%	86%	87%	88%	90%					
4.	Nilai Kinerja Anggaran	80	82	83	85	86					
5.	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	81%	83%	84%	85%					
6.	Kinerja implementasi WBK satker	70	72	73	74	75					
7.	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	46%	47%	48%	50%					

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1.	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan	Seksi PK & SE	Seksi PK & SE
		2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Seksi PK & SE	Seksi PK & SE
		3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	Seksi PRL & KLW	Seksi PRL & KLW
		4.	Nilai Kinerja Anggaran	Sub. Bagian Tata Usaha	Bagian Perencanaan
		5.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Sub. Bagian Tata Usaha	Penanggungjawab Laporan Keuangan
		6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	Sub. Bagian Tata Usaha	Seksi PKSE, PRL dan Sub Bagian Tata Usaha
		7.	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Sub. Bagian Tata Usaha	Sub. Bagian Kepegawaian

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU
TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	1. Pemeriksaan / penapisan org 2. Pemerikssn alat agkut sesuai kekarantinaan 3. Pemeriksaan barang 4. Pemeriksaan lingkungan	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	1. Faktor risiko yang dikendalikan pd org 2. Faktor risiko yg dikendalikan pada barang 3. Faktor risiko yg dikendalikan pd alat angkut 4. Faktor risiko yg dikendalikan pd lingkungan	90%	92%	93%	94%	95%
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara			85%	86%	87%	88%	90%
4.	Nilai Kinerja Anggaran	E-Monev DJA		80	82	83	85	86
5.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan			80%	81%	83%	84%	85%
6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	Dinilai dari Assesmant		70	72	73	74	75
7.	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun		45%	46%	47%	48%	50%